



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1503 TAHUN 2021  
TENTANG  
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021;
  - b. bahwa hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021, telah melalui proses verifikasi, validasi, dan penilaian oleh Asesor Eksternal, serta reviu dan pengolahan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

KEDUA : Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1503 TAHUN 2021  
TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021

**Hasil Evaluasi SPBE Kementerian**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1,98	Cukup
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2,95	Baik
3.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,38	Baik
4.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2,80	Baik
5.	Kementerian Sekretariat Negara	2,88	Baik
6.	Kementerian Dalam Negeri	3,17	Baik
7.	Kementerian Luar Negeri	2,87	Baik
8.	Kementerian Pertahanan	2,48	Cukup
9.	Kementerian Agama	2,35	Cukup
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,68	Sangat Baik
11.	Kementerian Keuangan	3,72	Sangat Baik
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3,33	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
13.	Kementerian Kesehatan	2,79	Baik
14.	Kementerian Sosial	1,56	Kurang
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	2,90	Baik
16.	Kementerian Perindustrian	1,38	Kurang
17.	Kementerian Perdagangan	3,42	Baik
18.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2,99	Baik
19.	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3,44	Baik
20.	Kementerian Perhubungan	2,84	Baik
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3,82	Sangat Baik
22.	Kementerian Pertanian	3,44	Baik
23.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,62	Baik
24.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2,75	Baik
25.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2,75	Baik
26.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3,05	Baik
27.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2,56	Cukup
28.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2,61	Baik
29.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2,16	Cukup
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,99	Baik
31.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,59	Cukup

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,92	Baik
33.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2,80	Baik
34.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2,48	Cukup

**Hasil Evaluasi SPBE Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,05	Baik
2.	Badan Informasi Geospasial	2,95	Baik
3.	Badan Keamanan Laut	2,97	Baik
4.	Badan Kepegawaian Negara	2,92	Baik
5.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2,81	Baik
6.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2,05	Cukup
7.	Badan Narkotika Nasional	2,21	Cukup
8.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2,68	Baik
9.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1,67	Kurang
10.	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	2,75	Baik
11.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2,91	Baik
12.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,03	Baik
13.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2,71	Baik
14.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3,15	Baik
15.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2,69	Baik
16.	Badan Pusat Statistik	3,81	Sangat Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
17.	Badan Siber dan Sandi Negara	2,88	Baik
18.	Badan Standardisasi Nasional	3,35	Baik
19.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	2,52	Cukup
20.	Lembaga Administrasi Negara	3,01	Baik
21.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1,75	Kurang
22.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2,19	Cukup
23.	Lembaga Ketahanan Nasional RI	2,08	Cukup
24.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3,66	Sangat Baik
25.	Perpustakaan Nasional RI	3,40	Baik

#### **Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Badan Intelijen Negara	2,29	Cukup
2.	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	2,65	Baik

#### **Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Sekretariat Kabinet	2,22	Cukup

#### **Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Badan Pemeriksa Keuangan	3,07	Baik
2.	Dewan Perwakilan Daerah	2,54	Cukup
3.	Dewan Perwakilan Rakyat	2,84	Baik
4.	Kejaksaan Agung	1,30	Kurang
5.	Komisi Yudisial	2,21	Cukup
6.	Mahkamah Agung RI	2,49	Cukup
7.	Mahkamah Konstitusi	1,70	Kurang
8.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,06	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Radio Republik Indonesia	1,87	Cukup
2.	Televisi Republik Indonesia	1,87	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Lembaga Non Struktural (LNS)

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Badan Amil Zakat Nasional	1,49	Kurang
2.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2,71	Baik
3.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1,42	Kurang
4.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1,95	Cukup
5.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	2,59	Cukup
6.	Dewan Ketahanan Nasional	2,42	Cukup
7.	Dewan Pers	1,34	Kurang
8.	Kantor Staf Presiden	2,03	Cukup
9.	Komisi Aparatur Sipil Negara	2,09	Cukup
10.	Komisi Informasi Pusat	2,29	Cukup
11.	Komisi Kejaksaan	1,21	Kurang
12.	Komisi Pemberantasan Korupsi	3,42	Baik
13.	Komisi Pemilihan Umum	2,16	Cukup
14.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1,18	Kurang
15.	Komisi Penyiaran Indonesia	2,21	Cukup
16.	Konsil Kedokteran Indonesia	1,81	Cukup
17.	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	1,42	Kurang
18.	Lembaga Sensor Film	1,41	Kurang
19.	Ombudsman Republik Indonesia	2,21	Cukup
20.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2,88	Baik



### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Aceh	3,19	Baik
2.	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,25	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,10	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Simeulue	1,16	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Bireuen	2,06	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	1,95	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,62	Baik
8.	Pemerintah Kab. Nagan Raya	1,76	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,20	Cukup
10.	Pemerintah Kota Sabang	1,53	Kurang
11.	Pemerintah Kota Banda Aceh	2,62	Baik
12.	Pemerintah Kota Langsa	1,98	Cukup
13.	Pemerintah Kota Lhokseumawe	1,54	Kurang
14.	Pemerintah Kota Subulussalam	1,00	Kurang

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2,77	Baik
2.	Pemerintah Kab. Deli Serdang	2,39	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Karo	2,06	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Langkat	2,36	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,52	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	2,10	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Dairi	2,07	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,12	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,87	Baik
10.	Pemerintah Kab. Asahan	1,71	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Toba	1,69	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,73	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
13.	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	1,50	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,69	Baik
15.	Pemerintah Kab. Samosir	3,16	Baik
16.	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,28	Cukup
17.	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,39	Kurang
18.	Pemerintah Kab. Batubara	1,96	Cukup
19.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,86	Cukup
20.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,47	Cukup
21.	Pemerintah Kota Medan	2,76	Baik
22.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2,48	Cukup
23.	Pemerintah Kota Binjai	1,67	Kurang
24.	Pemerintah Kota Pematang Siantar	1,53	Kurang
25.	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2,85	Baik
26.	Pemerintah Kota Sibolga	1,00	Kurang
27.	Pemerintah Kota Padangsidempuan	2,06	Cukup
28.	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,03	Cukup

#### **Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Pemerintah Provinsi Riau	2,55	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Kampar	1,67	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1,77	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Pelalawan	1,38	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	1,78	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Siak	1,90	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	2,96	Baik
8.	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	1,19	Kurang

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
9.	Pemerintah Kota Pekanbaru	2,17	Cukup
10.	Pemerintah Kota Dumai	2,56	Cukup

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1,96	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Bintan	2,06	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Natuna	2,24	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2,03	Cukup
5.	Pemerintah Kota Batam	2,64	Baik
6.	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2,29	Cukup

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2,69	Baik
2.	Pemerintah Kab. Agam	2,31	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Pasaman	1,36	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2,68	Baik
5.	Pemerintah Kab. Solok	2,82	Baik
6.	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,60	Baik
7.	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	3,34	Baik
8.	Pemerintah Kab. Tanah Datar	2,18	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Sijunjung	1,88	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Solok Selatan	1,21	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Dharmasraya	1,09	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,18	Cukup
13.	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,26	Cukup
14.	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,09	Cukup

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
15.	Pemerintah Kota Sawahlunto	2,07	Cukup
16.	Pemerintah Kota Solok	2,34	Cukup
17.	Pemerintah Kota Padang	2,47	Cukup
18.	Pemerintah Kota Payakumbuh	2,42	Cukup
19.	Pemerintah Kota Pariaman	2,42	Cukup

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jambi	2,21	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Batang Hari	2,03	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,10	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Bungo	1,46	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Merangin	1,00	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Kerinci	1,56	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,27	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Tebo	1,97	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,18	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	1,16	Kurang
11.	Pemerintah Kota Jambi	1,69	Kurang
12.	Pemerintah Kota Sungai Penuh	1,44	Kurang

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2,62	Baik
2.	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2,82	Baik
3.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,39	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Muara Enim	2,73	Baik
5.	Pemerintah Kab. Lahat	2,03	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Musi Rawas	2,00	Cukup

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
7.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	2,49	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,00	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	2,19	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	1,29	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,23	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	1,09	Kurang
13.	Pemerintah Kota Palembang	2,66	Baik
14.	Pemerintah Kota Pagar Alam	1,06	Kurang
15.	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	1,71	Kurang
16.	Pemerintah Kota Prabumulih	2,56	Cukup
17.	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,99	Cukup

#### **Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,60	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bangka	2,25	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Belitung	2,40	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2,27	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	2,76	Baik
6.	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	2,88	Baik
7.	Pemerintah Kab. Belitung Timur	2,15	Cukup
8.	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2,10	Cukup

#### **Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu**

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	2,79	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	1,44	Kurang

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
3.	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	1,96	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	1,84	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Seluma	1,41	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Mukomuko	1,74	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Kepahiang	1,94	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Lebong	1,55	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	1,29	Kurang
10.	Pemerintah Kota Bengkulu	1,68	Kurang

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Lampung	2,76	Baik
2.	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	1,67	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	1,86	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Lampung Barat	1,91	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Tanggamus	1,00	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Way Kanan	2,10	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	1,97	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,03	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Mesuji	1,69	Kurang
10.	Pemerintah Kota Metro	2,14	Cukup
11.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,20	Kurang

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3,47	Baik

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,28	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bogor	2,72	Baik
3.	Pemerintah Kab. Sukabumi	1,56	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Cianjur	2,46	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Bekasi	1,60	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Karawang	3,39	Baik
7.	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,37	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Subang	2,44	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Bandung	2,98	Baik
10.	Pemerintah Kab. Sumedang	3,52	Sangat Baik
11.	Pemerintah Kab. Garut	3,25	Baik
12.	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	2,05	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Ciamis	3,32	Baik
14.	Pemerintah Kab. Cirebon	1,91	Cukup
15.	Pemerintah Kab. Kuningan	2,24	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Indramayu	2,57	Cukup
17.	Pemerintah Kab. Majalengka	2,82	Baik
18.	Pemerintah Kab. Bandung Barat	2,85	Baik
19.	Pemerintah Kab. Pangandaran	2,38	Cukup
20.	Pemerintah Kota Bandung	3,19	Baik
21.	Pemerintah Kota Bogor	3,11	Baik
22.	Pemerintah Kota Sukabumi	2,98	Baik
23.	Pemerintah Kota Cirebon	2,83	Baik
24.	Pemerintah Kota Bekasi	2,94	Baik
25.	Pemerintah Kota Depok	2,99	Baik
26.	Pemerintah Kota Cimahi	2,75	Baik
27.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	2,68	Baik
28.	Pemerintah Kota Banjar	2,72	Baik

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Banten	3,15	Baik

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
2.	Pemerintah Kab. Serang	2,64	Baik
3.	Pemerintah Kab. Pandeglang	1,95	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Lebak	2,86	Baik
5.	Pemerintah Kab. Tangerang	2,99	Baik
6.	Pemerintah Kota Tangerang	3,40	Baik
7.	Pemerintah Kota Cilegon	2,03	Cukup
8.	Pemerintah Kota Serang	2,97	Baik
9.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2,48	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I. Yogyakarta

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah D.I. Yogyakarta	3,49	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bantul	3,62	Sangat Baik
3.	Pemerintah Kab. Sleman	2,55	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,49	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,22	Baik
6.	Pemerintah Kota Yogyakarta	2,98	Baik

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2,74	Baik
2.	Pemerintah Kab. Semarang	2,36	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Kendal	3,27	Baik
4.	Pemerintah Kab. Demak	3,19	Baik
5.	Pemerintah Kab. Grobogan	2,51	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,63	Baik
7.	Pemerintah Kab. Batang	3,24	Baik
8.	Pemerintah Kab. Tegal	2,55	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Brebes	2,34	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Pati	2,75	Baik
11.	Pemerintah Kab. Kudus	2,53	Cukup



<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
12.	Pemerintah Kab. Pemasang	2,49	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Jepara	3,04	Baik
14.	Pemerintah Kab. Rembang	2,76	Baik
15.	Pemerintah Kab. Blora	2,80	Baik
16.	Pemerintah Kab. Banyumas	2,73	Baik
17.	Pemerintah Kab. Cilacap	2,81	Baik
18.	Pemerintah Kab. Purbalingga	2,23	Cukup
19.	Pemerintah Kab. Banjarnegara	2,42	Cukup
20.	Pemerintah Kab. Magelang	2,67	Baik
21.	Pemerintah Kab. Temanggung	2,78	Baik
22.	Pemerintah Kab. Wonosobo	2,32	Cukup
23.	Pemerintah Kab. Purworejo	2,34	Cukup
24.	Pemerintah Kab. Kebumen	3,05	Baik
25.	Pemerintah Kab. Klaten	2,74	Baik
26.	Pemerintah Kab. Boyolali	2,82	Baik
27.	Pemerintah Kab. Sragen	3,03	Baik
28.	Pemerintah Kab. Sukoharjo	2,93	Baik
29.	Pemerintah Kab. Karanganyar	2,40	Cukup
30.	Pemerintah Kab. Wonogiri	2,80	Baik
31.	Pemerintah Kota Semarang	2,98	Baik
32.	Pemerintah Kota Salatiga	2,34	Cukup
33.	Pemerintah Kota Pekalongan	2,82	Baik
34.	Pemerintah Kota Tegal	2,39	Cukup
35.	Pemerintah Kota Magelang	2,71	Baik
36.	Pemerintah Kota Surakarta	2,75	Baik

#### **Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2,82	Baik
2.	Pemerintah Kab. Gresik	3,31	Baik
3.	Pemerintah Kab. Mojokerto	2,71	Baik
4.	Pemerintah Kab. Sidoarjo	2,37	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Jombang	2,51	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Sampang	2,98	Baik
7.	Pemerintah Kab. Pamekasan	2,12	Cukup

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>Predikat</b>
8.	Pemerintah Kab. Sumenep	2,38	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Bangkalan	1,62	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Bondowoso	2,25	Cukup
11.	Pemerintah Kab. Situbondo	2,43	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Banyuwangi	3,53	Sangat Baik
13.	Pemerintah Kab. Jember	1,96	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Malang	2,25	Cukup
15.	Pemerintah Kab. Pasuruan	2,39	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Probolinggo	2,59	Cukup
17.	Pemerintah Kab. Lumajang	2,56	Cukup
18.	Pemerintah Kab. Kediri	3,12	Baik
19.	Pemerintah Kab. Tulungagung	2,39	Cukup
20.	Pemerintah Kab. Nganjuk	2,14	Cukup
21.	Pemerintah Kab. Trenggalek	2,58	Cukup
22.	Pemerintah Kab. Blitar	2,76	Baik
23.	Pemerintah Kab. Madiun	3,21	Baik
24.	Pemerintah Kab. Ngawi	2,65	Baik
25.	Pemerintah Kab. Magetan	2,56	Cukup
26.	Pemerintah Kab. Ponorogo	2,59	Cukup
27.	Pemerintah Kab. Pacitan	1,41	Kurang
28.	Pemerintah Kab. Bojonegoro	2,45	Cukup
29.	Pemerintah Kab. Tuban	2,35	Cukup
30.	Pemerintah Kab. Lamongan	3,32	Baik
31.	Pemerintah Kota Surabaya	3,16	Baik
32.	Pemerintah Kota Mojokerto	2,92	Baik
33.	Pemerintah Kota Malang	2,73	Baik
34.	Pemerintah Kota Pasuruan	1,83	Cukup
35.	Pemerintah Kota Probolinggo	2,59	Cukup
36.	Pemerintah Kota Blitar	3,19	Baik
37.	Pemerintah Kota Kediri	3,06	Baik
38.	Pemerintah Kota Madiun	3,06	Baik
39.	Pemerintah Kota Batu	2,56	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,26	Baik
2.	Pemerintah Kab. Sambas	1,69	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Sanggau	2,27	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Sintang	1,51	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Mempawah	2,28	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,37	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Ketapang	1,20	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Bengkayang	1,76	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Landak	2,36	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Sekadau	2,50	Cukup
11.	Pemerintah Kab. Kubu Raya	2,30	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,06	Cukup
13.	Pemerintah Kota Pontianak	3,31	Baik
14.	Pemerintah Kota Singkawang	2,60	Baik

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1,00	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Barito Utara	1,63	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Barito Selatan	2,28	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	1,66	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,35	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	1,79	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Lamandau	2,27	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Sukamara	1,51	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Katingan	2,22	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Barito Timur	1,57	Kurang
11.	Pemerintah Kota Palangka Raya	2,11	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,60	Baik
2.	Pemerintah Kab. Banjar	2,43	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Tanah Laut	2,75	Baik
4.	Pemerintah Kab. Tapin	1,89	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,46	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,33	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Tabalong	2,48	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Kotabaru	1,99	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	2,50	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Balangan	1,77	Kurang
11.	Pemerintah Kota Banjarmasin	2,48	Cukup
12.	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,11	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,48	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Paser	1,36	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,83	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Kutai Timur	1,03	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,14	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,03	Kurang
8.	Pemerintah Kota Samarinda	2,46	Cukup
9.	Pemerintah Kota Balikpapan	2,44	Cukup
10.	Pemerintah Kota Bontang	2,11	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2,38	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Bulungan	2,10	Cukup
3.	Pemerintah Kota Tarakan	2,20	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,26	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Minahasa	1,99	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,03	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	1,56	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	1,50	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	1,42	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,02	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	2,46	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,83	Cukup
10.	Pemerintah Kota Manado	1,84	Cukup
11.	Pemerintah Kota Bitung	2,11	Cukup
12.	Pemerintah Kota Tomohon	1,67	Kurang
13.	Pemerintah Kota KotaMabagu	2,41	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2,51	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Gorontalo	1,31	Kurang

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
3.	Pemerintah Kab. Bone Bolango	2,02	Cukup
4.	Pemerintah Kota Gorontalo	1,90	Cukup

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1,38	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Poso	1,97	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Buol	1,93	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Morowali	1,53	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	1,45	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Sigi	1,61	Kurang
7.	Pemerintah Kota Palu	1,06	Kurang

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2,05	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Pinrang	2,62	Baik
3.	Pemerintah Kab. Gowa	1,47	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Wajo	2,42	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Bone	2,08	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Maros	2,19	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Luwu	2,29	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Sinjai	2,07	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,03	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Bantaeng	2,28	Cukup
11.	Pemerintah Kab. Jeneponto	1,84	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	2,05	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Barru	2,07	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	1,79	Kurang

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
15.	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,11	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Soppeng	1,71	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Enrekang	2,34	Cukup
18.	Pemerintah Kab. Luwu Utara	2,68	Baik
19.	Pemerintah Kota Makassar	2,04	Cukup
20.	Pemerintah Kota Parepare	2,17	Cukup
21.	Pemerintah Kota Palopo	2,34	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1,05	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Kolaka	2,50	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2,52	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	1,79	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Buton Utara	1,11	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Buton Selatan	1,09	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Buton Tengah	1,83	Cukup
8.	Pemerintah Kota Kendari	1,79	Kurang
9.	Pemerintah Kota Baubau	1,00	Kurang

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,03	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Mamuju	1,52	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	2,71	Baik
4.	Pemerintah Kab. Majene	1,52	Kurang

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Bali	3,68	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kab. Buleleng	2,30	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Jembrana	2,83	Baik
4.	Pemerintah Kab. Klungkung	3,01	Baik
5.	Pemerintah Kab. Gianyar	2,73	Baik
6.	Pemerintah Kab. Karangasem	2,43	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Bangli	2,28	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Badung	1,78	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Tabanan	2,07	Cukup
10.	Pemerintah Kota Denpasar	3,19	Baik

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi NTB	2,94	Baik
2.	Pemerintah Kab. Lombok Barat	2,64	Baik
3.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	2,37	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,11	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Dompu	1,00	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	2,65	Baik
7.	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,01	Cukup
8.	Pemerintah Kota Mataram	2,34	Cukup
9.	Pemerintah Kota Bima	2,02	Cukup

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi NTT	2,28	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Kupang	1,60	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	1,10	Kurang



No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
4.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,26	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Alor	1,90	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Sikka	1,11	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Flores Timur	1,00	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Ende	1,00	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Manggarai	1,55	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Sumba Timur	1,75	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Sumba Barat	1,68	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Rote Ndao	1,00	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	2,34	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	1,15	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,56	Kurang
16.	Pemerintah Kab. Nagekeo	1,60	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1,00	Kurang
18.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1,05	Kurang
19.	Pemerintah Kab. Malaka	1,31	Kurang

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Maluku	1,93	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,60	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1,79	Kurang
4.	Pemerintah Kota Ambon	2,08	Cukup

#### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	1,00	Kurang

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
2.	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,02	Cukup
3.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	1,20	Kurang

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,04	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Sorong	1,87	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Manokwari	1,51	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1,42	Kurang
5.	Pemerintah Kota Sorong	1,03	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	1,20	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1,22	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	1,53	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,63	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Kaimana	1,12	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Tambrau	1,00	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Maybrat	1,00	Kurang

### Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Papua	1,80	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Biak Numfor	1,00	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Jayawijaya	1,55	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Keerom	1,09	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Jayapura	1,47	Kurang
6.	Pemerintah Kota Jayapura	1,74	Kurang

Demikian daftar indeks SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO